

# **BAHAN AJAR**

## **MATAKULIAH**

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**(UNTUK KALANGAN SENDIRI)**

**SEMESTER GENAP 2021/2022**

**OLEH : DRS. DERADJAT MAHADI SASOKO, MM**

**DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**UNIVERSITAS JAYABAYA**

# DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b> .....	iv
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN DAN PENGENALAN MATAKULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	1
<b>BAB 2 : RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	4
<b>BAB 3 : TEORI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	7
<b>BAB 4 : PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL</b> .....	10
<b>BAB 5 : PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	11
<b>BAB 6 : PENYEMPURNAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	13
<b>BAB 7 : ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	16
<b>BAB 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)</b> .....	17
<b>BAB 9 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN</b> .....	18
<b>BAB 10 : ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b> .....	22
<b>BAB 11 : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	26
<b>BAB 12 : HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> .....	28
<b>BAB 13 : PEMBANGUNAN DI BIDANG POLITIK DAN EKONOMI</b> .....	29
<b>BAB 14 : PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA</b> .....	31
<b>BAB 15 : PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	

.....	32
<b>BAB 16 : UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)</b>	
.....	33
<b>REFERENSI BUKU PEGANGAN</b>	
.....	34

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Administrasi Pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranta-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, Administrasi Pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni Administrasi dan Pembangunan. Perkembangan Administrasi Pembangunan, baik dalam tatanan teoritik maupun praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya Administrasi Negara dan studi Pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami Administrasi Pembangunan perlu dimulai dengan pemahaman mengenai Administrasi dan Pembangunan.

Materi Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang Administrasi Pembangunan, Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan, Teori Administrasi Pembangunan, Peranan Serta Fungsi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, Perencanaan dan Administrasi Pembangunan, Penyempurnaan dan Administrasi Pembangunan, Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan, Administrasi Kepegawaian Untuk Pembangunan, Administrasi Pembiayaan Pembangunan, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Hukum dan Administrasi Pembangunan, Pembangunan di Bidang Politik dan Ekonomi, Pembangunan di Bidang Sosial Budaya, dan Pembangunan Di Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Setelah mempelajari materi matakuliah ini, diharapkan memiliki kompetensi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman tentang Administrasi Pembangunan.

## BAB 1

PERTEMUAN KE 1

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**PENDAHULUAN DAN PENGENALAN MATAKULIAH ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN**

**A. HAKIKAT ADMINISTRASI**

### **1. Definisi Administrasi**

#### **1. Administrasi dalam pengertian sempit**

Merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi jika dibutuhkan.

#### **2. Administrasi dalam pengertian luas**

Dapat dibedakan dalam tiga sudut :

1. Ditinjau dari sudut **Proses**, administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan, hingga pencapaian tujuan.
2. Ditinjau dari sudut **Fungsi atau Tugas**, administrasi berarti keseluruhan tindakan (aktivitas) yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai “administrator”(memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi).
3. Ditinjau dari sudut **Kepranataan (Institusi)**, administrasi berarti kegiatan yang dilakukan suatu lembaga dalam aktivitas tertentu, misalnya pada lembaga perbankan terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu.

### **2. Ilmu Administrasi**

Adalah hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematika, yang mengungkapkan kejelasan tentang obyek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang diperankan oleh manusia dan obyek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerja sama menuju terwujudnya tujuan tertentu.

### **3. Sudut Pandang Administrasi**

#### **1. Administrasi sebagai ilmu**

Pada hakikatnya, perkembangan ilmu administrasi merupakan kajian yang mendalam pada alam nalar manusia yang dapat menembus cakrawala dunia,

yang ditandai gerak langkah rasionalitas dibidang filsafat ilmu administrasi sebagai berikut :

1. **Ontologis**, nilai dasar pemikiran manusia yang menggambarkan kebenaran dasar (apriori), breaker dari pangkal pikiran yang dikandung oleh ilmu administrasi.
  2. **Epistemologi**, perkembangan ilmu administrasi dalam pemikiran manusia terhadap rasionalitas melahirkan pandangan yang bercakrawala dan tidak dapat dijangkau sampai batas akhirnya.
  3. **Aksiologis**, ilmu administrasi memberikan makna yang hakiki apabila dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehingga memberikan kemudahan dan kelayakan berfikir serta bertindak bagi manusia yang mendalami ilmu administrasi.
2. Administrasi **sebagai pekerjaan**

Dalam administrasi terdapat sistem administrasi, yang secara garis besar terdiri dari dua sistem yaitu :

1. **Sistem alamiah** (natural system), yaitu sistem yang terbentuk karena alam, misalnya sistem tata surya dan sistem cuaca.
2. **Sistem buatan manusia** (man made system), yaitu sistem yang terbentuk karena hasil pemikiran atau perbuatan manusia, misalnya sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem kepegawaian, sistem hukum, sistem kerja, dan sistem pemerintahan. Pada dasarnya sistem administrasi lahir dari hasil pemikiran manusia

## **B. HAKIKAT PEMBANGUNAN**

### **1. Definisi Pembangunan**

1. Menurut Alexander (1994) Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.
2. Menurut Portes (1976) Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
3. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1994) Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
4. Menurut Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana.

### **2. Pengertian Pembangunan Ditinjau dari berbagai segi**

1. Menurut Seers (1996), dalam membangun terdapat pertimbangan Nilai (value judgment). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam membangun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat tersebut.

2. Menurut Riggs (1996), dalam membangun terdapat orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan yang dilakukan, selain merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik (dalam pengertian memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat), juga harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat.

### **3. Ide Pokok Pembangunan**

Menurut Sondang P. Siagian ada lima ide pokok dari pembangunan yang dilakukan yaitu :

1. Pembangunan Merupakan Sebuah Proses  
Sebagai sebuah proses, pembangunan berkelanjutan selama bangsa ada dan memiliki tahapan yang pada satu pihak sebagai independensi dan pada pihak lain sebagai bagian dari sesuatu yang tidak akan pernah berakhir.
2. Pembangunan Dilaksanakan secara sadar  
Pembangunan harus dilaksanakan secara sadar.
3. Pembangunan Dilaksanakan secara Terencana  
Perencanaan dalam pembangunan dapat berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.
4. Pembangunan Mengarah pada Modernitas  
Modernitas merupakan cara hidup yang lebih baru dan lebih baik dari sebelumnya.
5. Pembangunan Wadah Pembinaan Bangsa  
Wadah pembinaan bangsa berfungsi untuk memperkokoh fondasinya dan memantapkan keberadaannya di dunia Internasional.

### **4. Tujuan Pembangunan**

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
2. Tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

## **BAB 2**

PERTEMUAN KE 2

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### **1. Administrasi Negara : Embrio Administrasi Pembangunan**

Administrasi Pembangunan merupakan embrio Administrasi Negara, karena Administrasi Pembangunan berasal dari perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

##### **2. Perkembangan Administrasi Negara kearah Administrasi Pembangunan**

Menitik beratkan pada dua hal :

Pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan

Kedua, perhatian pada masalah interelasi (antar-hubungan) antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain

##### **3. Ciri, Perumusan, dan Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan**

a. Orientasi ditunjukkan pada usaha kearah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong perubahan besar (basic changes) di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan.

b. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Menurut Sondang P. Siagian (2007)

Secara garis besar ruang lingkup Administrasi Pembangunan adalah :

1. Penyempurnaan Administrasi Negara (the development administration)
2. Penyempurnaan Administrasi Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan (the administration of development).

##### **4. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana**

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal berikut :

- a. Falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakat



Pertama, negara memberikan kebebasan yang cukup besar pada masyarakat, sehingga pemerintah tidak turut mencampuri kegiatan masyarakat

Kedua, negara turut mencampuri kegiatan masyarakat sehingga kebebasan masyarakat untuk mandiri sangatlah kecil

- b. Peranan serta fungsi pokok pemerintah dalam pembangunan berencana, yaitu sebagai stabilisator dan pengawas terhadap pembangunan sehingga berguna untuk kesejahteraan (sosial-ekonomi) masyarakat
- c. Peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia, telah dijelaskan UUD 1945

## **5. Administrasi bagi Pembangunan Nasional**

### **a. Pembangunan Nasional secara Berkala**

Pokok pembangunan nasional adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), secara historis, masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi :

- 1. Masyarakat yang masih bersifat tradisional;
- 2. Masyarakat yang bersifat peralihan;
- 3. Masyarakat yang sudah bersifat maju.

### **b. Perencanaan dan Administrasi Pembangunan**

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), dimensi dalam perencanaan Administrasi Pembangunan yang operasional adalah :

- 1. Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan;
- 2. Berorientasi pada pelaksanaannya;
- 3. Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang lebih diinginkan serta perspektif waktu ;
- 4. Perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi rencana dan pelaksanaannya.

### **c. Penyempurnaan Administrasi untuk Pelaksanaan Pembangunan**

Perbaikan dan Penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan ;

- 1. Usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan dengan konteks yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh bidang, tidak hanya bidang-bidang yang strategis.
- 2. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara sebagian-sebagian. Pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pada bidang-bidang strategis, yang kemudian diharapkan berkembang dan memperluas pada bidang penyempurnaan administrasi negara lainnya.

### **d. Pertimbangan Ekonomis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

Dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1990), terdapat pertimbangan ekonomis sebagai dasar pertimbangan. Beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan ekonomis dalam pelaksanaan administrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak ada motif untung dan kemungkinan bangkrut maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan operasi swasta;
2. Masih sering terdapat paternalism dan spoil politik ataupun pribadi dalam administrasi negara sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi;
3. Adanya gejala empire building, yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil;
4. Berkembangnya prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.

## **BAB 3**

PERTEMUAN KE 3

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **C. TEORI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### 1. Definisi Administrasi dan Pembangunan

1. Mustopadidjaja, Administrasi Pembangunan adalah seni dan ilmu tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.
2. J.B. Kristadi, Administrasi Pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan
3. Sondang P. Siagian (1982), Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Paul Meadow, Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik

##### 2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz (1963), beberapa ciri Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan.
- b. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan.
- c. Perkembangan.
- d. Administrasi Pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada Administrasi Negara.

Sondang P. Siagian merumuskan ciri-ciri Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang.
- b. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif.

- c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan.
  - d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah.
  - e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
  - f. Administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan.
  - g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven.
3. Fungsi Administrasi dan Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, beberapa gambaran mengenai ruang lingkup fungsi Administrasi Pembangunan, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Administrasi dan Pembangunan

Administrasi Pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu :

1. The Development of Administration

Mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya.

2. The Administration of Development

Mencakup masalah perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif.

2. Kegiatan Administrasi Pembangunan

Ada dua kegiatan Administrasi dan Pembangunan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembangunan.

2. Pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi fungsional, seperti pelembagaan dalam arti sempit, kepegawaian, pembiayaan pembangunan, dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijaksanaan dan program pembangunan.

3. Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Menurut Awaloedin beberapa fungsi pelaksanaan peranan pemerintah, antara lain :

1. Fungsi Pengaturan, dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu :

- a. Penentuan kebijaksanaan
- b. Pemberian pengarahan dan bimbingan
- c. Pengaturan melalui perizinan dan
- d. Pengawasan

Fungsi pengaturan ini akan menghasilkan output berupa berbagai peraturan.

2. Kepemilikan usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
3. Penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

#### **D.MUNCULNYA ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

1. Keberadaan Administrasi dan Pembangunan
  - 1.Pihak-pihak yang menang perang dunia II
  - 2.Munculnya negara baru
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Administrasi Pembangunan
  - 1.Bidang politik
  - 2.Bidang ekonomi
  - 3.Bidang militer
  - 4.Bidang teknis
3. Ciri Administrasi yang Indikasinya ditemukan secara umum di Banyak Negara Berkembang

## **BAB 4**

PERTEMUAN KE 4

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

**FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA :**

1. Negara sebagai Negara Politik (political state)
  - a. Memelihara ketertiban dan keamanan
  - b. Fungsi pertahanan dan keamanan
  - c. Fungsi diplomatik
  - d. Fungsi perpajakan
2. Negara sebagai Negara Hukum (legal state)

Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat :

  - a. Perlindungan atas jiwa dan raga
  - b. Perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum
  - c. Penyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum
  - d. Tidak tercabutnya hak-haknya sebagai warga negara serta tidak diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa
3. Negara sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state)

Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materiil, akan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut harkat dan martabat manusia
4. Negara sebagai Negara Administratif (Administrative state)

Pemberdayaan rakyat menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan bahwa pemerintah dengan seluruh jajarannya merupakan abdi negara dan abdi masyarakat

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL :**

1. Peran selaku Stabilisator
2. Peran selaku Inovator
3. Peran selaku Modernisator
4. Peran selaku Pelopor
5. Peran selaku Pelaksana Sendiri

## **BAB 5**

PERTEMUAN KE 5

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Perencanaan Pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan.

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia.

Melalui Perencanaan, pemerintah dapat merumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Pada dasarnya, Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok berikut :

- a. Tujuan akhir yang dikehendaki
- b. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif)
- c. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut
- d. Masalah yang dihadapi
- e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- f. Kebijakan untuk melaksanakannya
- g. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya
- h. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya

Untuk melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai, seperti statistik. Oleh karena itu, manajemen pembangunan harus mampu mengupayakan tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan.

Perencanaan memiliki berbagai sifat, bergantung cara melihat dan pendekatannya :

1. Dari segi ruang lingkup dan sarannya, perencanaan dapat bersifat
  - a. Nasional
  - b. Sektoral dan
  - c. Spasial

2. Perencanaan dapat berupa perencanaan
  - a. Agregatif atau Komprehensif dan
  - b. Parsial
3. Dalam jangkauan dan hierarkinya, perencanaan berada pada
  - a. Tingkat pusat dan
  - b. Tingkat daerah
4. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat
  - a. Jangka panjang
  - b. Jangka menengah dan
  - c. Jangka pendek
5. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat
  - a. Dari atas ke bawah (top down)
  - b. Dari bawah ke atas (bottom up) atau
  - c. Kedua-duanya
6. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi kedepannya, perencanaan dapat
  - a. Indikatif atau
  - b. Preskriptif
7. Berdasarkan sistem politiknya (Friedman, 1987), perencanaan dapat bersifat
  - a. Alokatif
  - b. Inovatif dan
  - c. Radikal

Adapun produk perencanaan dapat berbentuk

- a. Rencana (plan)
- b. Kebijakan
- c. Peraturan
- d. Alokasi anggaran
- e. Program atau proyek

Kegagalan perencanaan, menurut Ginanjar tidak disebabkan perencanaan itu sendiri, tetapi bersumber pada beberapa hal berikut ini :

1. Penyusunan perencanaan yang tidak tepat mungkin disebabkan informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau perencanaan sejak awal yang tidak realistis sehingga tidak dapat terlaksana.
2. Perencanaannya baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
4. Perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia hingga hal yang paling kecil.

Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan negara yang telah terbukti kemajuannya, seperti Jepang dan negara-negara industri baru, merupakan sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem itu, perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta



## **BAB 6**

PERTEMUAN KE 6

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PENYEMPURNAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### **1. Hakikat Penyempurnaan Administrasi**

Pada hakikatnya, penyempurnaan administrasi merupakan usaha sadar untuk melakukan perubahan dan penyesuaian administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan administrasi pemerintah.

Penyempurnaan Administrasi mencakup :

- a. Tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara, baik yang bersifat departemental maupun non departemental
- b. Sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara, termasuk sikap dan kesejahteraannya dengan maksud meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai pembangunan nasional

Definisi tersebut menunjukkan dua faktor sebagai hubungan sebab akibat dalam penyempurnaan Administrasi, yaitu ;

- a. Penyebab : perubahan tujuan, struktur, dan cara organisasi serta sikap aparat negara
- b. Akibat : efektivitas organisasi

Tiga unsur penting yang membedakan upaya penyempurnaan Administrasi dengan perubahan lainnya, yaitu :

- a. Kepentingan moral : menghilangkan cara yang salah di bidang Administrasi
- b. Perubahan terarah : sekali penyempurnaan dilakukan maka diusahakan penyempurnaan itu bersifat permanen
- c. Ketahanan Administrasi : perlu ada dukungan politik agar perubahan status quo berjalan lancar

##### **2. Faktor yang mempengaruhi Penyempurnaan Administrasi**

- a. Keadaan perubahan : tujuan, sasaran, dsb
- b. Agen pembaharu : orang yang melakukan perubahan
- c. Faktor lingkungan : kondisi negara tersebut

##### **3. Implementasi Penyempurnaan Administrasi Pembangunan**

###### **a. Hakikat Penyempurnaan Administrasi Pembangunan**

Menurut Ginadjar Kartasmita, dalam operasionalnya, penyempurnaan administrasi dapat dibagi dalam dua garapan :

1. Pembangunan Administrasi yang dilakukan di negara berkembang

2. Pembaharuan Administrasi yang dilakukan di negara-negara administrasinya relatif mapan

Selanjutnya Ginadjar Kartasmita, menegaskan bahwa penyempurnaan Administrasi perlu disesuaikan dengan lingkungan administrasi, yaitu kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan yang meliputi :

1. Bidang Politik
2. Bidang Ekonomi dan
3. Bidang Sosial

b. Strategi Implementasi Penyempurnaan Administrasi Pembangunan

Penyempurnaan Administrasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu :

1. Penyempurnaan menyeluruh, meliputi kepemimpinan dan masa ada yang mendukung
2. Penyempurnaan sebagian (incremental), meliputi kepemimpinan atau masa ada yang mendukung
3. Tidak ada Penyempurnaan, meliputi kepemimpinan dan masa ada yang mendukung

c. Filosofi Penyempurnaan Administrasi

**Riggs**, menjelaskan penyempurnaan Administrasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Perubahan Struktural, yaitu perubahan struktur dan fungsi organisasi dalam suatu negara untuk mengoptimalkan kebutuhan dan diferensiasi tinggi
2. Perubahan Kinerja yaitu :
  - a. Menekankan pada teamwork (personal performance dan social performance)
  - b. Membedakan antara hasil (accomplishment) dan upaya yang dilakukan (endeavour) penyempurnaan administrasi lebih ditekankan
  - c. Efektivitas dan efisiensi

**Wallis** memberikan pandangan tentang penyempurnaan administrasi sebagai berikut :

1. Perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya
2. Perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja (deliberate) dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha
3. Perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara

d. Cara-cara Penyempurnaan Administrasi

1. Privatisasi dan Ko Produksi

**Privatisasi** adalah pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah kepada swasta

**Ko Produksi** adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mengadakan sesuatu

2. Debirokratisasi dan Reorganisasi
3. Perubahan Sikap Birokrasi
4. Deregulasi dan Regulasi

Deregulasi dimaksudkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, sedangkan regulasi dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kesempatan bagi pihak yang lemah dan tertinggal untuk tumbuh

4. Upaya Penyempurnaan Administrasi di Indonesia

Dalam pelaksanaan pembangunan, usaha penyempurnaan administrasi pemerintahan tidak hanya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga melaksanakan tugas pembangunan, dalam arti menyusun rencana, program, serta pengendalian dari pelaksanaan pembangunan itu secara baik.

5. Pertimbangan Ekonomis Pelaksanaan Administrasi

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, pertimbangan ekonomis, menurut Bintoro tetap menjadi dasar pertimbangan

## **BAB 7**

PERTEMUAN KE 7

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

1. Aspek Politik
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Sosial Budaya
4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik
5. Aspek Institusional

## BAB 8

**UNIVERSITAS JAYABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP ( UTS )  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH : **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
DOSEN : **DRS.DERADJAT MAHADIS, MM**  
RUANG : **ONLINE/WAG**  
WAKTU : **90 MENIT**

**SOAL :**

1. Jelaskan hal-hal dibawah ini dengan singkat !
  - a. Administrasi dalam arti Luas
  - b. Definisi tentang Pembangunan
  - c. Sebut dan jelaskan tentang Hakikat Penyempurnaan Administrasi
  - d. Jelaskan tentang Proses Munculnya Administrasi Pembangunan

2. Beberapa waktu terakhir bahkan sampai saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat. Banyak dampak yang timbul dan dirasakan oleh hampir seluruh negara, dampak tersebut dirasakan disemua lini kehidupan utamanya bidang ekonomi. Situasi Perekonomian merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan.

Menurut saudara, langkah-langkah mana yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dilihat dari :

1. Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
2. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.

Jelaskan Analisa Saudara !

3. Jelaskan tentang Ruang lingkup Administrasi Pembangunan

4. Sebutkan dan jelaskan Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

**Selamat Mengerjakan**

## **BAB 9**

PERTEMUAN KE 9

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN**

##### **A. HAKIKAT KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN**

###### **1. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Menurut F.X. Soedjadi (1995) Administrasi Kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat para karyawan/anggotanya.

###### **2. Status Kepegawaian**

###### **a. Pegawai Percobaan**

Pegawai Percobaan biasanya merupakan status pegawai yang tergolong masih baru, baik lingkungan lembaga pemerintah maupun lingkungan lembaga swasta

###### **b. Pegawai Harian**

Pegawai Harian adalah orang yang bekerja pada suatu instansi, pada lingkungan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Pegawai dengan status ini digaji satu hari sekali, dua hari sekali, seminggu sekali, atau dua minggu sekali bergantung pada kesepakatan awal.

###### **c. Pegawai Bulanan**

Pegawai bulanan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik negara maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap bulan sekali.

###### **d. Pegawai Borongan**

Pegawai borongan adalah pegawai yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik negara maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan hasil kerja yang dicapainya.

###### **e. Pegawai Musiman**

Pegawai musiman adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik negara maupun swasta selama jangka waktu tertentu.

###### **3. Sistem Kepegawaian**

###### **a. Sistem Kawan (Patronage System)**

Sistem Kawan merupakan sistem kepegawaian yang bersifat subyektif, artinya pengangkatan seorang pegawai berdasarkan hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan pihak yang diangkat.

###### **b. Sistem Kecakapan (Merit System)**

Sistem Kecakapan bersifat obyektif. Pengangkatan seorang pegawai didasarkan pada kecakapan yang dimiliki. Ukuran awal untuk mengetahui kecakapan seorang calon pegawai antara lain ijazah yang dimiliki atau hasil tes yang dicapainya.

c. Sistem Karier (Career System)

Menurut sistem ini, seseorang diterima menjadi pegawai karena pertimbangan kecakapan.

4. Sistem Penggajian

a. Upah atau Gaji

Seseorang yang melakukan pekerjaan bagi orang lain, penghasilan yang diperolehnya disebut gaji atau upah. Perbedaan antara keduanya, gaji dipergunakan di lingkungan lembaga pemerintah atau perusahaan negara sedangkan upah banyak dipergunakan di lingkungan perusahaan swasta.

b. Sistem Pengupahan atau Penggajian

1. Sistem Pengupahan Menurut Waktu

Sistem Pengupahan Menurut Waktu merupakan sistem pengupahan yang didasarkan atas jumlah waktu para pekerja bekerja.

2. Sistem Pengupahan Menurut Hasil Kerja

Sistem Pengupahan Menurut Hasil Kerja, pengupahan didasarkan atas hasil kerja dari masing-masing pekerja.

3. Sistem Pengupahan Menurut Standard Waktu

Sistem Pengupahan Menurut Standard Waktu, upah dibayarkan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Sistem Pengupahan Menurut Kerjasama Pengusaha dan Pekerja

Sistem Pengupahan Menurut Kerjasama Pengusaha dan Pekerja, sistem ini meliputi pembagian keuntungan yang pembayarannya dilakukan kemudian sebagai tambahan atau dikombinasikan dengan sistem pembayaran upah lainnya. Sistem ini disebut tunjangan (fringe benefits) atau pembayaran tidak langsung.

**B. PROSES PENERIMAAN TENAGA KERJA**

1. Penarikan Tenaga Kerja

Pencarian atau penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman dan kepribadian.

2. Sumber-sumber Tenaga Kerja

Sumber tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber tenaga kerja dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan.

Adapun sumber dari luar perusahaan, antara lain : teman pegawai perusahaan, badan penempatan kerja, lembaga pendidikan.

3. Seleksi dan Orientasi

Pada umumnya, seleksi dilaksanakan apabila pendaftar lebih dari jumlah lowongan yang tersedia dalam perusahaan. Setelah lolos seleksi, pegawai tersebut harus mengikuti Orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerja/pegawai baru kepada lingkungan perusahaan.

### C. PEMBINAAN DAN KEAMANAN TENAGA KERJA

Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja (Safety Committee). Faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan Panitia Pembina Keselamatan Kerja antara lain :

1. Tata Ruang Kerja
2. Pakaian Kerja
3. Lingkungan Kerja

### D. PRODUKTIVITAS KERJA

#### 1. Makna Produktivitas Kerja

R.Saint Paul (1997) definisi produktivitas kerja yaitu perbandingan antara hasil yang diproduksi dan jumlah kerja yang dikeluarkan untuk memproduksinya atau dalam pengertian lebih umum, rasio antara kepuasan yang dikehendaki dan pengorbanan yang dilakukan.

George J. Washnis (1967) dalam bukunya *Productivity Improvement Handbook* menyatakan bahwa bahwa produktivitas mengandung dua konsep, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan maupun alam, yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki, sedangkan Efektivitas mengukur hasil dan mutu pelayanan yang dicapai.

#### 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja

##### a. Keterampilan

Keterampilan atau kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.

##### b. Kesiapan Pegawai untuk Melaksanakan Tugas dengan penuh semangat dan Tanggung jawab.

Hal ini akan terwujud apabila pegawai atau pekerja merasakan kebutuhan hidupnya, baik fisik maupun non fisik, relatif terpenuhi.

Kebutuhan hidup pegawai yang sangat penting adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan Hidup yang bernilai Psikologis
  - a. Kebutuhan rasa aman
  - b. Kebutuhan rasa berhasil
  - c. Kebutuhan untuk diperlakukan sebagai teman sejawat/warga
2. Kebutuhan Hidup yang bernilai Ekonomis dan bersifat Fisik  
Bernilai ekonomis antara lain upah atau gaji, jaminan sosial, dan berbagai tunjangan dan insentif dalam bentuk uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.



Bersifat fisik antara lain tata ruang kerja, pakaian kerja, alat pelindung diri, dan lingkungan kerja seperti udara, suara, cahaya, warna, serta bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dipergunakan dalam perusahaan.

## E. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENSIUN

### 1. Hakikat Pemutusan Hubungan Kerja dan Pensiun

Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara hormat dapat juga dengan cara tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila Pemutusan kerja dilakukan diluar kesalahan pekerja. Sebaliknya Pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan pekerja. Begitu pula, dalam hal pensiun.

### 2. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pensiun

a. Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai/pekerja karena keinginan pengusaha disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Tidak cakap dalam masa percobaan;
2. Adanya alasan-alasan mendesak;
3. Sering mangkir;
4. Ditahan oleh alat negara;
5. Dihukum oleh hakim;
6. Sering sakit;
7. Berusia lanjut;
8. Pengurangan tenaga kerja.

b. Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai/pekerja karena keinginan pekerja disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan;
2. Pindah perusahaan karena mengikuti keluarga;
3. Bekerja karena alasan mendesak.

c. Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai/pekerja karena alasan lain yang disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Meninggal dunia;
2. Perjanjian kerja berakhir;
3. Pekerjaan telah selesai.

### 3. Pensiun

Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai/pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdikan kepada negara atau perusahaan.

## **BAB 10**

PERTEMUAN KE 10

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

##### **A. HAKIKAT ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

###### **1. Pengertian Administrasi Pembiayaan**

Menurut Badrudin, dkk (2004: 62) administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan mulai tingkat perencanaan sampai pengukuran biaya yang efisien.

Menurut Masyhud (2005: 187) administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit, administrasi pembiayaan adalah tata pembukuan yang berfungsi untuk pencatatan keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha. Pengertian secara luas, administrasi pembiayaan adalah kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana, baik individual maupun lembaga.

###### **2. Dasar Hukum Administrasi Pembiayaan**

###### **a. Dasar Hukum Keuangan Negara**

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu :

1. UUD 1945 khususnya pasal 23;
2. UUPPI (ICW) Stbl 1925 No.448 jo.No. 9 tahun 1969;
3. RAB (Peraturan Administrasi) Stbl 1993 No. 381;
4. UU tentang APBN setiap tahun;
5. Keppres dan Inpres, antara lain Keppres No.16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pembangunan;
6. Keputusan atau edaran BPK;
7. Keputusan atau edaran Menteri Keuangan;
8. SKB beberapa Menteri tentang Pembangunan.

###### **b. Dasar Hukum Keuangan Daerah**

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah, yaitu :

1. UUD 1945 khususnya pasal 18;
2. UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. UU yang mengatur Perimbangan Keuangan;
4. PP.No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. PP. No. 65 Tata Cara Penyusunan APBD, Tata Cara Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD;

6. Permendagri, Kepmendagri, dan edaran Mendagri yang menyangkut Keuangan Daerah.
3. Prinsip Administrasi Pembiayaan  
Menurut Husnurdin (2005: 187) prinsip-prinsip administrasi keuangan, yaitu :
    - a. Hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan teknis yang disyaratkan;
    - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan;
    - c. Terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai bukti penggunaannya;
    - d. Menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri.
  4. Sumber Pembiayaan Pembangunan  
Sumber Pembiayaan Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1986: 100), adalah sebagai berikut :
    - a. Sumber dana dari dalam negeri  
Penerimaan dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak.
    - b. Sumber dana dari tabungan masyarakat  
Tabungan masyarakat dilakukan melalui perbankan dan lembaga keuangan atau bentuk penanaman modal.
    - c. Sumber dana dari luar negeri
    - d. Sejalan dengan pemberian kepada daerah termasuk sumber keuangannya, dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :
      1. Pendapatan Asli daerah ;
      2. Dana Perimbangan;
      3. Bagian Daerah atau Bagi Hasil;
      4. Dana Alokasi Umum;
      5. Dana Alokasi Khusus;
      6. Pinjaman Daerah;
      7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

## B. SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Anggaran Belanja Sebagai Program Kegiatan Pemerintah  
Jenis-jenis anggaran belanja yaitu :
  - a. Anggaran belanja penjualan;
  - b. Anggaran belanja produksi;
  - c. Anggaran belanja tunai;
  - d. Anggaran belanja pemasaran;
  - e. Anggaran belanja proyek;
  - f. Anggaran belanja pendapatan dan;
  - g. Anggaran belanja ekspeditur.
 Tujuan anggaran belanja adalah :
  - a. Menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model agar bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa dan rencana tertentu

- b. Memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan.
2. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran di Indonesia
- Didasarkan pada :
- a. UUD 1945;
  - b. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - e. UU No. 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - g. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN )

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Struktur APBN

APBN terdiri atas sebagai berikut :

- 1. Anggaran pendapatan, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah;
- 2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
- 4. APBN mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun berikutnya.

b. Pendapatan Negara dan Belanja Negara

APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara terdiri atas sebagai berikut :

- 1. Produk Domestik Bruto;
- 2. Produk Nasional Bruto;
- 3. Produk Nasional Neto;
- 4. Pendapatan Nasional Neto;
- 5. Pendapatan Perseorangan;

6. Pendapatan Bebas.

Belanja negara terdiri atas sebagai berikut :

1. Belanja Pemerintah Pusat;
2. Belanja Pemerintah Daerah.

C. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Dokumen Pelaksanaan APBN
  - a. Pengelola DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran)
    1. Pejabat negara pengelola DIPA;
    2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
    3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - b. Substansi dan Proses Pengelolaan DIPA
2. Klasifikasi Anggaran di Indonesia
  - a. Sebelum Reformasi Anggaran
  - b. Setelah Reformasi Keuangan Negara
3. Klasifikasi Anggaran baru
  - a. Klasifikasi Organisasi
  - b. Klasifikasi Fungsional
  - c. Klasifikasi Ekonomi
    1. Belanja Pegawai
    2. Belanja Barang
    3. Belanja Modal
    4. Beban Bunga
    5. Subsidi
    6. Bantuan Sosial
    7. Hibah
    8. Belanja Lain-lain
  - d. Klasifikasi Kode Anggaran

D. PROYEK UNTUK ANGGARAN PEMBANGUNAN, DAN KEGIATAN UNTUK ANGGARAN RUTIN

1. Proyek untuk Anggaran Pembangunan
  - a. Manajemen Proyek
  - b. Manajemen dan Proses Perancangan
    1. Fungsi dan Proses Perancangan
    2. Tahapan Perancangan
    3. Rencana Kerja
    4. Tim Perancangan dan Pelaksana Proyek
    5. Unsur Pengendalian Proyek
2. Kegiatan untuk Anggaran Rutin
  - a. Hakikat Anggaran Rutin
  - b. Anggaran Belanja Rutin

## **BAB 11**

PERTEMUAN KE 11

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### **A. HAKIKAT FUNGSI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

###### **1. Hakikat Pentingnya Administrasi**

Administrasi merupakan hal penting, yang keberadaannya memengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk menyempurnakan sistem administrasi yang baik dengan seefisien dan seefektif mungkin.

###### **2. Domain Administrasi Pembangunan**

Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan Kebijakan penyempurnaan administrasi negara. Hal ini menyangkut penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, penataan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya.

b. Perumusan Kebijakan dan program program pembangunan (untuk berbagai bidang), serta pelaksanaannya secara efektif.

Administrasi untuk pembangunan dapat pula dibagi dalam dua subfungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pembangunan;
2. Pelaksanaan secara efektif.

###### **3. Fungsi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

- a. Unsur Pembaharu
- b. Kepemimpinan
- c. Analisis dan Pembentukan Kebijakan

##### **B. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA**

###### **1. Hakikat Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

Administrasi Pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan petunjuk MPR yang dituangkan dalam GBHN. Administrasi Pembangunan diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan pada tingkat memadai sehingga pembangunan dapat dikatakan berhasil.

###### **2. Teknis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

- a. Sistem Perencanaan Pembangunan
- b. Sistem Pembiayaan Pembangunan
- c. Pelaksanaan Proyek Pembangunan
- d. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

e. Pengawasan Pembangunan

3. Hubungan Aparatur Pemerintah dan Pelaksana Administrasi Pembangunan di Indonesia.

Para aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah sebagai penentu dan pelaksana Administrasi Pembangunan.

C. PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

1. Pengenalan Peran dan Aparatur Pemerintah serta Administrasi Pembangunan

Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan mengacu pada pengaruh yang diberikan oleh para aparatur negara terhadap proses pelaksanaan Administrasi Pembangunan melalui tingkah, perilaku, dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan.

2. Bentuk Peranan Pemerintah

- a. Penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan;
- b. Abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat;
- c. Pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat (entrepreneur);
- d. Unsur pendorong pembangunan/pembaharuan (development agent).

3. Klasifikasi Aparatur Pemerintah

Klasifikasi aparatur pemerintah berdasar fungsinya :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Unit organisasi dibawah naungan pemerintah, misalnya pembinaan koperasi dan program pembangunan masyarakat desa;
- d. Organisasi badan-badan otonomi, misalnya perusahaan negara.

D. ORGANISASI (PEMERINTAH BERIKUT BIROKRASI) BAGI PEMBANGUNAN

Birokrasi bertujuan untuk mengorganisasikan secara teratur pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.

## **BAB 12**

PERTEMUAN KE 12

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Prosedur Administrasi dalam rangka penyusunan pengajuan, penetapan, serta penghindaran kesimpangsiuran dari sublegislasi (sub legislation) perlu mendapat perhatian dalam Administrasi Pembangunan.

Bentuk-bentuk hukum dan hierarki dari keputusan mengenai kebijaksanaan negara atau pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat : Undang-Undang
3. Pemerintah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Pemerintah : Peraturan Pemerintah
5. Presiden : Keputusan Presiden
6. Presiden : Instruksi Presiden
7. Pemerintah : Surat Edaran Pemerintah
8. Menteri : Keputusan Bersama Menteri-menteri
9. Menteri : Peraturan Menteri
10. Menteri : Keputusan Menteri

Dalam konteks Sistem Perencanaan Pembangunan maka ditetapkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



## **BAB 13**

PERTEMUAN KE 13

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PEMBANGUNAN DI BIDANG POLITIK DAN EKONOMI**

DEFINISI POLITIK :

1. MENURUT PANDANGAN KLASIK : usaha-usaha yang ditempuh warga negara yang berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal kebaikan bersama
2. MENURUT PANDANGAN KELEMBAGAAN : hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dalam wilayah tertentu
3. MENURUT PANDANGAN KEKUASAAN : kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan, politik dalam masyarakat
4. MENURUT PANDANGAN FUNGSIONAL : kegiatan merumuskan dan melaksanakan kegiatan umum
5. MENURUT PANDANGAN KONFLIK : kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai

ARAH PEMBANGUNAN POLITIK DIWUJUDKAN MELALUI

1. Penyempurnaan Struktur Politik
2. Penataan Peran Negara dan Masyarakat
3. Pengembangan Budaya Politik
4. Perbaikan Proses Politik
5. Peningkatan Peran Hubungan Luar Negeri
6. Peningkatan Peran Komunikasi dan Informasi

#### **1. POLITIK DALAM NEGERI**

- a. Penyempurnaan Struktur Politik
- b. Penataan Peran Negara dan Masyarakat
- c. Pengembangan Budaya Politik
- d. Perbaikan Proses Politik

#### **2. HUBUNGAN LUAR NEGERI**

- a. Pemantapan Politik Luar Negeri
- b. Peningkatan Kerjasama Internasional
- c. Penegasan Komitmen Perdamaian

#### **3. KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

- a. Pengembangan Pers dan Media Massa
- b. Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Jaringan Informasi

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

### **PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI**

Secara umum pembangunan Ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan menaikkan mutu hidup rakyat.

Mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar.

Kebutuhan dasar esensial untuk kehidupan kita terdiri dari tiga bagian :

1. Kebutuhan Dasar untuk kelangsungan hidup hayati
2. Kebutuhan Dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi
3. Derajat Kebebasan untuk memilih

## **BAB 14**

PERTEMUAN KE 14

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA**

1. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
  - 1) Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 2) Program Upaya Kesehatan
  - 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - 4) Program Sumber Daya Kesehatan
  - 5) Program Obat, Makanan, dan Obat Berbahaya
  - 6) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
  - 7) Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
  - 8) Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial
  - 9) Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-masalah Sosial
  - 10) Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial
  - 11) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan
  - 12) Program Pemberdayaan Keluarga
  - 13) Program Kesehatan Reproduksi Keluarga
  - 14) Program Keluarga Berencana (KB)
  - 15) Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB
2. KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN PARIWISATA
3. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEREMPUAN INDONESIA
4. PEMUDA DAN OLAH RAGA

## **BAB 15**

### **PERTEMUAN KE 15**

DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM

ONLINE/WAG

### **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

#### **PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Pada dasarnya, sasaran pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah untuk menjamin bahwa suatu negara bangsa mampu untuk :

1. Menjamin Integritas Nasionalnya
2. Menjamin keutuhan Teritorial wilayah kekuasaan suatu negara
3. Menjamin kehormatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
4. Memiliki kemampuan menangkis serangan yang datang dari luar
5. Mematahkan berbagai usaha memecah persatuan dan kesatuan negara, bangsa seperti dalam bentuk subversi, pemberontakan, dan separatisme yang mungkin timbul didalam negeri
6. Memelihara ketertiban umum, serta
7. Menjamin kelangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan

Dengan perkataan lain, pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan, seperti dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya, dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan mendapat pengakuan de jure oleh dunia internasional.

#### **PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL**

Ketahanan Nasioanal adalah suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus menerus. Ketahanan bukanlah merupakan suatu fenomena sosial politik yang tumbuh dengan sendirinya dan bukan pula merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. Ketahanan Nasioanal berkaitan erat dengan serta memperhitungkan berbagai variabel dalam suatu negara.

Meskipun belum terdapat keseragaman pendapat dikalangan para ahli tentang berbagai variabel yang harus diperhitungkan dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan ketahanan nasioanal yang tangguh, delapan variabel tampaknya menonjol adalah :

1. Faktor Geografis
2. Faktor Penduduk
3. Faktor Kekayaan Alam
4. Faktor Ideologi Nasional
5. Faktor Politik
6. Faktor Ekonomi
7. Faktor Sosial Budaya dan
8. Faktor Kekuatan Militer

## BAB 16

**UNIVERSITAS JAYABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP ( UAS )  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH : **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
DOSEN : DRS.DERADJAT MAHADIS, MM  
RUANG : ONLINE/WAG  
WAKTU : 90 MENIT

**SOAL :**

1. Jelaskan hal-hal dibawah ini dengan singkat !
  - e. Administrasi dalam arti Luas
  - f. Definisi tentang Pembangunan
  - g. Pengertian Administrasi Pembangunan Menurut F.X. Soedjadi (1995)
  - h. Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja
  - i. Jelaskan tentang Proses Munculnya Administrasi Pembangunan

2. Beberapa waktu terakhir bahkan sampai saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat. Banyak dampak yang timbul dan dirasakan oleh hampir seluruh negara, dampak tersebut dirasakan disemua lini kehidupan utamanya bidang ekonomi. Situasi Perekonomian merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan.

Menurut saudara, langkah-langkah mana yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dilihat dari :

1. Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
2. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.

Jelaskan Analisa Saudara !

3. Pembangunan Di Bidang Ekonomi dan Politik, serta Pertahanan Keamanan  
Jelaskan yang saudara ketahui !

4. Bentuk-bentuk hukum dan hierarki dari keputusan mengenai kebijaksanaan negara atau pemerintah,

Jelaskan yang saudara ketahui !

**Selamat Mengerjakan**

## **ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

### **REFERENSI BUKU PEGANGAN :**

#### **I. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### **TEORI DAN PRAKTIK**

1. Dr. Sahya Anggara, M.Si.
2. Li Sumantri, M.Ag.

#### **II. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### **KONSEP, DIMENSI, DAN STRATEGINYA**

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A.

#### **III. PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

##### **KONSEP, TEORI, DAN IMPLIKASINYA**

Afifuddin, S.Ag., M.Si.